

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang Masalah

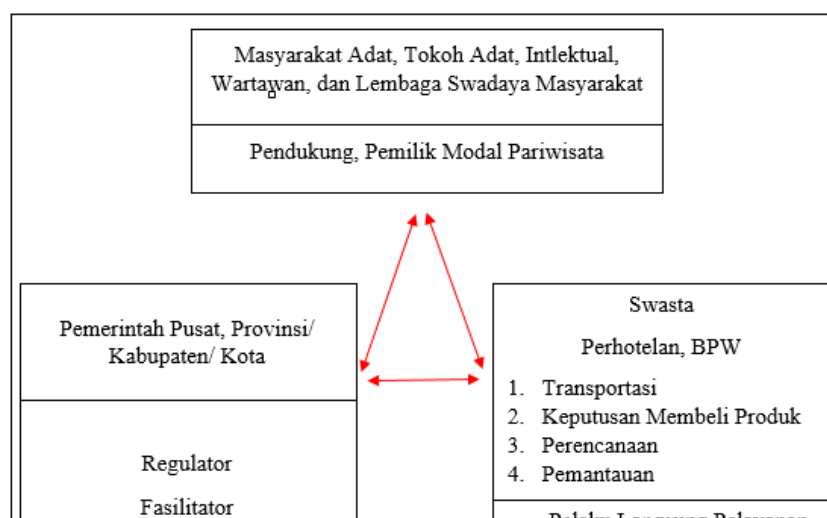
Pada awal bulan maret 2020 pemerintah Indonesia secara resmi memberitakan adanya kasus pasien positif Covid-19 pertama kali di kota Depok. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Pandemi virus Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, setelah mengetahui hal tersebut pemerintah Indonesia mulai mengambil beberapa tindakan strategis untuk penanggulangan wabah Covid-19, langkah- langkah tersebut dimaksudkan untuk terus menekan angka persebaran kasus positif Covid-19. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu mulai menerapkan kehidupan normal baru atau new normal setelah berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah dan sekarang mulai menyosong kehidupan next normal.

Salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kumulatif kunjungan wisatawan asing ke Indonesia Pada tahun 2021 adalah sekitar 1,65 juta orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4,05 juta orang, maka jumlah tersebut menurun sebanyak 61,59 persen. Dan wisatan domestik dari tahun 2020 sejumlah 112,697 orang sedangkan di tahun 2021 capaian sebanyak 82,337 orang, maka angka tersebut menurun 303,59 persen. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan Asing maupun domestik dua tahun terakhir yang datang indonesia mengalami penurunan, merespon hal tersebut sektor pariwisata dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah merumuskan berbagai paket kebijakan dan strategi untuk menghadapi kondisi new normal tersebut, bahkan sudah bersiap-siap untuk menyongsong kondisi normal berikutnya (*next normal*) (Efendi et al., n.d.). Impelementasi strategi-strategi tertentu untuk menuju kondisi next normal menjadi hal yang harus dijalankan agar dapat mengembalikan

perekonomian nasional. Bagi sektor pariwisata, tahap ini menjadi tahap yang penting karena untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung setelah masa pandemi (Pratiwi et al., 2021). Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mulai menerapkan strategi next normal di sektor pariwisata diharapkan menjadi angin segar untuk memperbaiki tatanan dan membangkitkan kembali pariwisata yang ada Indonesia secara perlahan-lahan.

Pengelolaan pariwisata pada awalnya banyak dikerjakan oleh pemerintah, namun dengan seiring keperluan masyarakat kepada penyajian pariwisata yang meningkat dan seketika kemampuan pemerintah yang terbatas, maka dari itu keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyajian pariwisata merupakan suatu kepercayaan (zaenuri,2017). Keterkaitan internal swasta dan masyarakat dalam pengelolaan aplikasi pariwisata adalah bagian dari konsep *collaborative governance* yang berbentuk kolaborasi diantara ketiga stakeholder tersebut. Kolaborasi dengan mengaplikasikan paradigma visi bersama dan partisipasi, dengan cara untuk melaksanakan jalur koordinator dan kolaborasi pada bidang tata kelola pariwisata. Perlibatan pada pengelolaan pariwisata pihak swasta dan masyarakat juga merupakan penggunaan dari teori *paradigm new public governance* yang berkembang pada ilmu administrasi public. Paradigma *governance* tersebut biasa digunakan sebagai alternatif upaya melaksanakan akselerasi (Ansell & Gash, 2008). Dalam hal tersebut lebih efisien untuk melakukan kolaborasi antara ketiga pilar *governance* tersebut yaitu, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Konsep tentang pilar *governance* dalam sistem pariwisata bisa dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1Aktor-aktor dalam sektor pariwisata



Sumber : Zaenuri, 2018

Secara umum para klanagn aktor pariwisata yang ada di kelompokan menjadi 3 bagian tersebut. Menurut (Zaenuri, 2018) dalam kategori kelompok pemerintah adalah bagian pusat, daerah serta desa yang berperan menjadi pengatur dan penyedia. Pihak swasta yang mencakup perhimpunan usaha pariwisata dan investor pariwisata sebagai aktor langsung pariwisata. Selanjutnya kelompok masyarakat adalah bagian dalam tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media informasi yang berperan dalam penunjang pariwisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai kota wisata dengan berbagai jenis wisata seperti candi, museum, pantai, desa wisata, peninggalan bersejarah dan sebagainya. Keistimewaan pariwisata di DIY dibandingkan dengan daerah lain adalah terdapat pada kekayaan budaya serta alamnya, banyak wisatawan yang menjadikan yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel kunjungan wisatawan baik domestik maupun Mancanegara lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik dan Macanegara di DIY

Tahun	Jumlah Wisatawan Domestik	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2018	5.272.719,00	416.372,00
2019	6.116.354,00	433.027,00

2020	1.778.580,00	69.968,00
2021	4.279.985,00	14.740,00
2022	1.669.742,00	5.615,00

Sumber: Data Statistik Pariwisata DIY (Diolah,2022)

Dari table diatas pada tahun 2018-2019 kunjungan wisatawan di DIY mengalami kenaikan. Sektor Pariwisata mulai dirasakan terpengaruh oleh pandemi sejak dibelakukanya tanggap darurat pada bulan maret 2020 yaitu dengan ditutup sementara untuk mencegah penyearan virus Covid-19. Jumlah kerugian disektor pariwisata DIY mencapai Rp 67,04 miliar yang mencakup 1,207unit pada jenis usaha pariwisata (Wicaksono, 2021). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga merupakan salah satu provinsi yang mengembangkan desa wisata untuk menarik wisatawan. Pada awal tahun 2021, jumlah desa wisata terdaftar di lima kabupaten/kota berjumlah 145 desa wista, dengan tahapan 31 desa wisata maju, 39 desa wisata berkembang, dan 75 desa wisata tumbuh atau embrio.

Berdasarkan data dari kementrian pariwisata 2016, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 kawasa stategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan yang terus dikembangkan adalah Gunungkidul (Andriyanto & Wihayati, 2021) . Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki pesona wisata yang indah serta beragam, ada sekitar 69 Objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, pantai-pantai dan wisata alam lainnya seperti goa, perbukitan, sungai dan lainnya menjadi daya tarik untuk parawisatawan berkunjung di Gunungkidul. Salah satu desa wisata yang sudah berkembang di Gunung Kidul adalah Desa Wisata Bejiharjo. Desa ini pernah meraih predikat sebagai desa wisata terbaik oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012. Desa Bejiharjo berlokasi di Kecamatan

Karangmojo, Gunung Kidul. Topografi Desa Bejiharjo cukup beragam, mulai dari deretan persawahan, aliran sungai, goa, dan pegunungan. Dari potensi tersebut tidak heran jika Desa Wisata Bejiharjo mengusung wisata alam sebagai konsep utama wisata desa. Beberapa objek wisata yang dikembangkan didesa wisata bejiharjo diantaranya adalah Cave Tubing Goa Pindul, River Tubing Sungai Oyo Susur Gua Gelatik serta Susur Gua Sriti. Desa wisata Bejiharjo juga menawarkan edukasi serta seni budaya melalui Wayang beber, Doger, Gejog Lesung, serta cerita legenda Gedong gelaran. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah dari destinasi wisata alam mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2016 telah mencapai 5,8 miliar dengan kurun waktu 5 tahun. Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes) berhasil menjadikan objek wisata alam menjadi primadona bagi para wisatawan di wilayah gunungkidul, dengan penghasilan Rp 1,14 miliar pertahun (Pradana & Gerry, 2021). Akan tetapi karenanya adanya wabah virus covid-19 menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung didesa wisata bejiharjo yang artinya pendapatan wisata juga mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Objek Wisata Bejiharjo
Tahun 2018-2020

Bulan	Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Objek Wisata Bejiharjo tahun 2018-2020					
	Pengunjung			Pendapatan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Januari	12.224	9.094	12.448	116.932.00	86.393.000	118.256.000
Februari	6.825	6.649	6.482	64.837.500	63.070.500	61.579.000
Maret	6.100	8.140	3.604	57.590.000	77.330.000	34.238.000
April	11.887	16.243	-	112.926.500	153.928.500	-
Mei	7.551	5.096	-	71.734.500	47.300.500	-
Juni	15.040	16.996	-	142.880.000	161.426.000	-
Juli	13.108	18.804	-	124.526.000	177.887.500	-
Agustus	6.980	7.189	2.048	66.310.000	68.295.500	19.456.000
September	6.050	7.542	1.732	57.475.000	71.649.000	16.454.000
Oktober	6.054	7.817	2.721	57.513.000	73.691.500	25.849.500
November	6.513	9.076	2.721	61.873.500	86.222.000	25.849.500
Desember	16.129	23.441	3.223	153.225.500	222.404.500	30.618.500
Total	114.461	136.030	34.979	1.088.183.500	1.28634.500	332.300.500

Sumber: Dinas Pariwisata Gunung Kidul (Diolah,2022)

Di awal tahun 2022 desa wisata bejiharjo mulai bangkit karena adanya kebijakan yang sudah memperbolehkan tempat wisata untuk beroperasi kembali. Dalam tahap ini desa wisata sudah memasuki tahap next normal dengan protocol kesehatan menjadi unsur terpenting pada saat kita berwisata dan untuk membangkitkan kembali desa wisata tersebut dibutuhkan *collaborative governance* dalam pemulihan obyek pariwisata yang ada di kabupaten Gunungkidul.

Dari pernyataan diatas, pariwisata menjadi peluang dan tantangan di era next normal. Kerjasama antar stakeholder menjadi unsur paling penting dalam pengembangan obyek pariwisata semaksimal mungkin, karena setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing, hal tersebut sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata yang lebih baik. penelitian ini akan membahas secara detail sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah dalam *collaborative governance* dengan pihak swasta dan masyarakat, dan peran masing-masing stakeholders yang ditemukan khususnya dalam pemulihan desa wisata bejiharjo kecamatan karangmojo Yogyakarta

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan yakni:

Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pemulihan desa wisata bejiharjo kecamatan karangmojo Yogyakarta era next normal?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui siapasaja aktor yang terlibat dalam pemulihan desa wisata bejiharjo kecamatan karangmojo Yogyakarta serta sudah sejauh mana *collaborative governance* dalam

pemulihan desa wisata bejiharjo kecamatan karangmojo Gunungkidul, Yogyakarta era next normal

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Untuk memahami kajian kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.
- Untuk memahami proses *collaborative governance* beserta peran masing-masing stakeholders dalam governance dalam pemulihan desa wisata bejiharjo kecamatan karangmojo Gunungkidul Yogyakarta era next normal

b. Manfaat Praktis

- Bisa menjadi acuan dan masukan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa di tempat lain yang tentunya berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pemulihan pariwisata.

1.5. Tinjauan Pustaka

Bagian tinjauan pustaka ini memaparkan beberapa kajian dan penulisan dari penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai sumber referensi jurnal yang berkaitan dengan penelitian kali ini yang berjudul “*collaborative governance* dalam Pemulihan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta era next normal dengan study kasus desa wisata Bejiharjo, karangmojo, Gunungkidul Yogyakarta. Tinjauan pustaka ini dijadikan sebagai bahan acuan penulis dengan melihat beberapa strategi pemulihan sektor pariwisata yang terkait dengan bencana. Adapun beberapa daftar tinjauan pustaka adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Pramodia Ahsan et al., 2022)	Collaborative Governance Model During COVID-19: Towards Sustainable Tourism in Yogyakarta	<p>Penelitian ini dalam temuannya menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memberikan efek domino bagi sektor pariwisata di Kota Yogyakarta dan berimplikasi pada pengurangan jumlah tenaga kerja secara besar-besaran. Dari penelitian ini ditemukan hasil analisis peran aktor dalam pemulihan sektor pariwisata. Peranan tertinggi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 dengan berbagai inovasi dan kebijakan yang dibuat. Sementara itu, respon masyarakat dan swasta masih relatif rendah. Pemulihan sektor pariwisata tidak bisa dilakukan oleh satu aktor, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara aktor dan pelaksana kebijakan.</p>
2.	(Suciati & Suadnya, 2021)	Strategi Pemulihan Pariwisata Pasca Penanganan Pandemi Covid-	<p>Penelitian menemukan bahwa untuk menarik wisatawan kembali ada beberapa yang harus dilaksanakan agar wisatawan merasa aman dan nyaman berwisata pada masa pandemic</p>

		19 Di Provinsi Bali	yakni <i>High Standard Sanitation, High Standard Security, Staycation, Niche tourism, Solo travel tour, Wellness tour, Virtual tourism</i>
3.	(Aeni & Astuti, 2019)	Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (studi pada kasus kegiatan pesta rakyat simpedes tahun 2019 di kabupaten Pati)”. Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan	fokus hasil penelitian menunjukkan sinergitas pemerintah dan pihak BUMN dalam pelaksanaan rencana startegis pengembangan pariwisata <i>sustainable development</i> di kabupaten pati, bahwa stakeholders yang terlibat adalah Bank BRI sebagai BUMN dan pemerintah daerah kabupaten Pati sebagai pengelola, dengan tujuan melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam agenda kegiatan Pesta Rakyat Simpedes upaya sebagai terobosan inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Pati.
4.	(Wida Lestari, Eka Yulyana, 2022)	Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi awal yang melatarbelakinya terbentuknya <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan wisata alam Green Canyon adalah minimnya fasilitas yang menunjang kenyamanan dan keamanan sedangkan wisata Green Canyon merupakan salah

		Pangkalan Kabupaten Karawang	satu andalan pariwisata di Kabupaten Karawang. Dan dalam koborasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata Alam Green Canyon tidak berjalan maksimal karena kurangnya perhatian dan pengetahuan dari para aktor yang terlibat, baik maupun swasta, serta peran pemerintah dalam menginisiasi kerjasama dengan masyarakat dan swasta.
5.	(Zaenuri, 2012)	Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari <i>Adaptive Governance</i> Menuju <i>Collaborative Governance</i> .	Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan pariwisata pasca bencana harus menggunakan paradigma <i>collaborative governance</i> . Bentuk kolaboratif melibatkan kerjasama antara institusi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan saling berbagi sumber daya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah pengelolaan pariwisata pasca erupsi merapi di Sleman, upaya yang dilakukan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata untuk mengembalikan citra daerah pariwisata adalah dengan melakukan promosi melalui kegiatan jumpa pers, booklet,

			poster, pameran, melakukan <i>road show</i> ke berbagai daerah serta melakukan pembicaraan dengan <i>stakeholder</i> kepariwisataan.
6	(Berlianda Ido & Fasa, 2022)	Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Dalam Mendukung Pelestarian Warisan Geologi: Perspektif Collaborative Governance	Dalam penelitian ini, peneliti mengatakan bahwa pengembangan geowisata memiliki kontribusi dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang dilaksanakan secara kolaborasi lintas sektor yaitu meliputi akademisi, bisnis, komunitas dan <i>government</i> dan media dengan sitilah lain 5 pilar ABCGM. Konsep tersebut yang dikembangkan bertujuan untuk membangun pariwisata dalam mencapai strategi pengembangan Geotourism yang berkelanjutan melalui skema pembangunan inklusif.
7	(Ali et al., 2018)	Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah	Penelitian ini menunjukkan badan promosi pariwisata daerah (BPPD) mampu memberi kontribusi yang besar terhadap kemajuan sektor pariwisata di kabupaten Lombok Utara, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang menginap di hotel berbintang dan terus meningkat cepat pertahunnya.

		Kabupaten Lombok Utara	kepariwisataan BPPD menggunakan strategi melalui periklanan, penjualan langsung, dan pubisitas sehingga dapat menaikkan jumlah kunjungan wisatawan dari hotel, taman nasional gunung rinjani, air terjun tiu kelep, pantai seperti gili trawangan, gili meno, gili air, dan masih banyak pantai yang indah di kabupaten Lombok utara. Namun dalam implementasi kebijakan <i>collaborative governance</i> penelitian ini belum adanya keterlibatan atau kerjasama dengan instansi yang bersangkutan dalam menunjang kepariwisataan.
8.	(Sedo Seka et al., 2022)	Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Proses Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ngada belum berjalan secara maksimal. Maka dari itu dinas pariwisata dan kebudayaan ngada, sebagai leading sector, harus lebih instens lagi dalam menjalankan proses kolaborasi dengan melibatkan aktor – aktor terkait yaitu swasta akademisi, komunitas, masyarakat serta media sebagai alternatif strategi yang

			diuraikan pada penelitian ini dalam pengembangan pariwisata budaya diwilayah kabupaten ngada.
9.	(Kusuma et al., 2021)	Strategi Pemulihan Dampak Wabah Covid Pada Sektor Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemulihan sektor pariwisata di DIY tidak dapat dilakukan secara cepat. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Bahkan Pengunjung destinasi wisata dibatasi sesuai kapasitas optimal untuk menuju pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi antara pelaku industri pariwisata, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan agar SMART Tourism dapat dibangun dan dikembangkan. Dalam penelitian ini penulis berpendapat Melalui pengembangan pariwisata yang inovatif dan pemenuhan protokol kesehatan serta standarisasi layanan wisata berstandart internasional, pariwisata di DIY diharapkan akan pulih di tahun 2022 Tahun 2020 merupakan tahun pengembangan SMART Tourism melalui aplikasi visiting jogja dan Jogja Pas.

10	(Hermawan, 2021)	Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Masa Pandemi Covid-19	<p>Dalam strategi pemulihan sektor pariwisata penelitian ini memberikan pemahaman mendalam bahwa Kemenparekraf selalu memiliki orientasi jangka Panjang dan jangka pendek dalam memulihkan sector pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemic ataupun pasca pandemic covid-19. Berbagai program yang dicanangkan telah melibatkan semua pihak seperti pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, swasta, ataupun pengusaha dan pelaku usaha di dunia pariwisata. Beberapa program yang dicanangkan dalam rangka pemulihan sector pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Indonesia Care, Certified CHSE, Hibah, dan Beli Kreatif Lokal. Kemenparekraf juga mencanangkan 3 platform program yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Peneliti juga menuliskan bahwa dengan adanya kolaborasi antar stakeholder tersebut dapat menjadi strategi pemulihan pariwisata pasca pandemi.</p>
11	(Andriani &	Collaborative Governance	<p>Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap proses-proses terjadinya</p>

	Setyowati, 2021)	Pengembangan Desa Wisata Sanankerto dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal	Collaborative Governance di Desa Wisata Sanankerto. Dimana proses pertama diawali dengan proses dialog antar aktor. Proses dialog antar aktor dilakukan bersamaan dengan proses kedua pelaksanaan collaborative governance; yaitu proses membangun kepercayaan antar aktor. Kedua proses tersebut dilakukan untuk menyadarkan masyarakat setempat agar lebih paham tentang pariwisata desa mereka dan peluangnya. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan saran untuk PEMKAB Malang segera membuat regulasi aturan yang mengatur tentang desa wisata. Karena hingga saat ini pengelola desa wisata tidak memiliki acuan yang jelas yang dapat mengakibatkan konflik didalam pengelolaan desa wisata.
12	(Umar et al., 2019)	kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi dalam mencapai pembangunan secara efektif, transparansi, akuntabel, dan memenuhi kebutuhan public. Hasil penelitian dapat disimpulkan,

		Sinjai, Sulawesi Selatan	<p>bahwa dialog antar muka dalam pembangunan sudah berlangsung dengan baik akan tetapi belum intensif. Membangun kepercayaan terhadap semua aktor yang terkait, ditandai dengan keterbukaan para stakeholders dalam menyampaikan pendapat, informasi, dan saling membantu dalam menyelesaikan konflik terjadi. Komitmen pada proses, aktor yang terkait dalam pembangunan mampu konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas kewajibannya. Pemahaman bersama para aktor dalam pembangunan mampu memahami tugas dan tanggung jawab dengan tujuan menjadikan hutan mangrove tongke-tongke sebagai obyek wisata yang banyak dikunjungi, dan menambah perekonomian masyarakat. Kemudian yang terakhir dampak sementara yaitu mangrove yang sudah tumbuh subur di daerah tongke-tongke mampu membranding daerah sehingga banyak kunjungan wisatawan datang ke daerah tersebut.</p>
13	(Utami et al., 2020)	Collaborative Governance	Hasil penelitian menunjukkan Collaborative governance di

		<p>Dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang</p>	<p>Pengembangan Desa Wisata Kemetul dipandang sebagai melalui model pemerintahan kolaboratif Ansel dan Gash masih belum dilakukan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya; musyawarah merupakan sarana komunikasi antar pemangku kepentingan dimana kerjasama dan ini dipimpin oleh kepala desa; sedangkan pokdarwis dan dispar membantu dalam pemberdayaan. Akan tetapi masih ada kendala pada kurangnya kejelasan aturan, pemahaman bersama dan komitmen para stakeholders.</p>
14	(Anggarini, 2021)	<p>Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid - 19</p>	<p>Hasil Penelitian ini terdapat tiga strategi dalam upaya pemulihan pariwisata dalam situasi pandemi. Pertama, Inovasi adalah hal utama dan harus ada perubahan mendasar saat ini; pemerintah mencari destinasi prioritas. Inovasi harus dilakukan dari segi infrastruktur; budaya; kuliner hingga fashion dan segala hal yang berkaitan dengan pariwisata serta ekonomi kreatif. Kedua, Adaptasi merupakan hal yang harus dilaksanakan karena semua pihak harus mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 yaitu dengan</p>

			<p>terus meningkatkan penerapan “CHSE” alias Kebersihan (Pembersihan); Kesehatan (Health); Safety (Keamanan); dan Environment (Ramah Lingkungan).</p> <p>Ketiga, Kolaborasi adalah semua pihak harus bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan sektor pariwisata karena jutaan lapangan pekerjaan dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; ini yang harus kita perjuangkan agar lapangan pekerjaan terbuka luas; dan meningkatnya pendapatan masyarakat.</p>
15	(Yasintha, 2020)	Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar	<p>Dalam penelitian ini penulis menguraikan collaborative yang dijalankan dalam pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar melalui dua konsep yakni proses kolaborasi oleh Willem dan Gash. Untuk konsep kolaborasi adapun hasil dari observasi diuraikan berdasarkan indikator sebagai berikut. Face to Face (dialog tatap muka) Penyelenggara pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar dibawah pengawasan pemerintah dan Dinas Pariwisata, Pengusaha Hotel dan Restoran,</p>

			<p>serta Tokoh Masyarakat. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas persiapan dan segala instrument yang diperlukan dalam pengembangan wisata Kebun Raya Tematik Gianyar. Akan tetapi dalam dialog tersebut belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder. Dari segi Commitment to Process Hal ini didasarkan pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Dalam kerjasama tersebut diikat dalam suatu kontrak kerjasama dengan pihak stakeholder baik masyarakat atau swasta. Kontrak kerjasama tersebut merupakan suatu bentuk ikatan komitmen antara berbagai pihak. Hanya saja karena sosialisasi dan promosi yang kurang masih banyak wisatawan lokal yang mendominasi kunjungan ke Kawasan ini. Sebaliknya dalam membangun relasi antara stakeholder collaborative yang dilaksanakan belum optimal, sejauh ini feedback dari kerjasama yang dilaksanakan belum dirasa optimal.</p>
--	--	--	--

16	(Kirana & Artisa, 2020)	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu	<p>Hasil penelitian ini adalah konsep Collaborative Governance yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor agar desa wisata dapat berkembang secara optimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat. Hal tersebut terlihat dari adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang wisata. Hal ini dapat terlihat dari adanya pola kerjasama dan komunikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Batu dengan berbagai aktor diantaranya pihak swasta, masyarakat, akademisi dan media. Masing-masing aktor memiliki kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga diberdayakan melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di masing-masing desa wisata. dalam pengembangan. Desa wisata ini perlu ada kemudahan dan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang, serta fasilitas lain</p>
----	-------------------------	---	---

			seperti promosi, transportasi dan akomodasi dan pemasaran yang terpadu.
17	(Rozikin et al., 2019)	Model Collaborative Governance Dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism	Hasil dalam penelitian ini Peran penting dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis indigenous tourism, bukan hanya pada peran pemerintah pusat ataupun daerah, tetapi melainkan peran keseluruhan aktor yang berada didalam masyarakat pariwisata yang memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini mampu diwujudkan apabila kerjasama keseluruhan aktor masyarakat pariwisata dapat terlaksana dengan baik, atau dengan istilah lain terwujudnya Collaborative Governance di sektor pariwisata. Collaborative atau kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan baik aktor maupun individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam beberapa kegiatan. pengembangan pariwisata berpotensi dalam hal peningkatan kualitas pariwisata yang ditunjang melalui

			<p>pengembangan destinasi, produk, infratraktur, aksesibilitas, daya tarik, dan promosi pariwisata melalui upaya collaborative governance</p>
--	--	--	---

Berdasarkan kajian tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang diteliti oleh beberapa stakeholders yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta memang ada kelebihan dan kekurangan, bahkan kendala masing-masing pihak yang berkaitan. Kesamaan penelitian terdahulu dan juga penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan fokus kajian *collaborative governance*. Namun perbedaan yang signifikan adalah kolaborasi yang diteliti dalam penelitian ini, terkait dengan semua stakeholder yang saling berhubungan yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta serta lebih fokus pada kajian pemulihan kepariwisataan setelah adanya pandemi virus Covid-19 di era next normal. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap penelitian - penelitian terdahulu terutama yang membahas upaya pemulihan pariwisata, sehingga dapat memperkaya wawasan dalam menunjang penelitian-penelitian yang selaras kedepannya.

1.6.Kerangka Teori

1.6.1. Collaborative Governance

Membahas mengenai *collaborative governance*, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan *governance*, karena istilah kata *governance* bagian dari konsep *collaborative governance*. Konsep dari *governance* lebih mengarahkan atau mengendalikan dalam bahasa latin klasik yang bermakna tindakan atau cara pandang mengatur, membimbing, dan mengarahkan. Sehingga *governance* merupakan praktek penyelenggaraan dan kekuasaan oleh pemerintah dalam mengelola urusan pemerintah secara umum dan pembangunan

ekonomi pada umumnya (Widodo, 2001). Sementara *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara upaya melakukan penyediaan public good dan service.

Tata kolaboratif didefinisikan sebagai tata kelola yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dengan tujuannya untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola aset publik (Ansell & Gash, 2008). Emily R (2005,21). mengungkapkan;

collaborative is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interaction are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence.

kolaboratif adalah keterlibatan timbal balik dari peserta dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah bersama-sama. Interaksi kolaboratif dicirikan oleh tujuan bersama, struktur yang simetris, dan tingkat negosiasi, interaksi, dan ketergantungan yang tinggi.

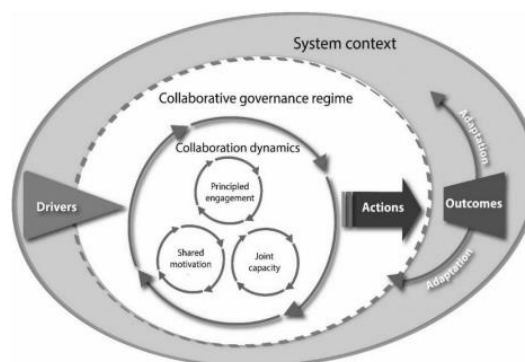
Tujuan utama dari pemerintahan kolaboratif adalah untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagai sumber daya yang berbeda agar tercipta pemikiran inovatif melalui kerjasama dan negosiasi (Innes & Booher, 2005)

Pada tahun 1990-an mulai dikembangkan paradigma *collaborative governance* sebagai paradigma baru yang mempunyai prinsip dasar adanya kesetaraan hubungan diantara pemangku kepentingan di sektor publik, swasta dan masyarakat yang didasarkan pada musyawarah dengan tujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program asset public (Ansell & Gash, 2007). Fosler (2002) juga menjelaskan lebih rinci bahwa kerjasama yang

bersifat kolaboratif dan melibatkan kejasama antar pihak intensif, termasuk adanya upaya secara alignment dalam tujuan, strategi, agenda dan aktivitas. Prasarat dasar agar *collaborative governance* dapat terwujud perlu adanya visi bersama yang diyakini sebagai gambaran masa depan oleh Stakeholder, dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama (Zaenuri, 2012). Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah, *collaborative governance* adalah kondisi yang dimana pemerintah untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar kelompok maupun seseorang (Richard J. Zeckhauser, n.d.).

Emerson memperdalam model *Collaborative governance* pada bukunya yang berjudul *Collaborative governance Regimes (CGR's)*. penggunaan istilah “rezim” digunakan untuk menunjuk pada motif tertentu atau sistem untuk mengambil keputusan publik dimana, kolaborasi lintas batas merupakan pola yang berlaku bagi perilaku dan aktivitas para stakeholder atau aktor kolaborasi.

Gambar 1. 2 Kerangka Integrative Collaborative Governance



Sumber: Emerson, 2015

Pada gambar kerangka integrative diatas dinamika kolaboratif terdiri dari tiga komponen interaktif yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Kemudian tiga komponen tersebut merupakan bekerja sama dengan cara yang interaktif dan berulang untuk menghasilkan tindakan

kolaboratif dan langkah-langkah yang diambil dalam rangka melakukan tujuan bersama dari CGR. Tindakan kolaboratif dalam CGR dapat berdampak internal dan eksternal dalam rezim; dengan demikian dalam gambar tersebut terlihat (yaitu ghasil dilapangan) dan adaptasi potensial (transformasi dari situasi yang kompleks atau masalah) baik dalam konteks sistem maupun pada CGR tersebut. Melalui siklus berulang dari dinamika kolaborasi ini, aktor otonom menjadi peserta dalam CGR dan mengembangkan tujuan kolektif, sasaran – sasaran, dan teori perubahan bersama yang dapat mendasari jalur yang disepakati untuk mencapai tujuan tersebut (Emerson & Woo, 2015). Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Kemudian Ansel dan Gash menyatakan bahwa proses *collaborative governance* dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Face to face dialog*

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog secara langsung atau interaktif dari setiap stakeholder yang terlibat dalam membahas kepentingan bersama. *Collaborative governance* pada dasarnya berorientasikan proses, maka dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara langsung bukanlah sekedar merupakan negosiasi yang seadanya dan juga dialog secara langsung ini dapat meminimalisir kontadiksi dan *disrespect* dari stakeholder yang terlibat, sehingga stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama (Rasyid & Darumurti, 2022).

b. *Trust building*

Rasa percaya antara stakeholder memang merupakan hal yang normal diawal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan sekedar tentang negosiasi antara stakeholder, namun merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan dengan aktor yang terlibat. Membangun kepercayaan sangat perlu dilakukan segera mungkin ketika proses

kolaborasi pertama dilaksanakan. Hal ini upaya agar para stakeholder tidak mengalami egosentral antar lembaga. Oleh karena itu dalam melakukan membangun kepercayaan, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi. Menurut Asteria (2016) Komunikasi yang efektif dengan berbagai pendekatan yang sesuai dapat mempermudah pencapaian tujuan dan mempererat hubungan antar stakeholders. Berikutnya menurut Budi (2012) menjelaskan bahwa aspek komunikasi dalam manajemen bencana adalah aspek yang paling krusial sehingga diperlukan pendalaman dalam prosesnya. Tahapan membangun kepercayaan ini juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena melibatkan banyak stakeholders.

c. *Commitment to process*

Komitmen tentunya mempunyai relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk berpartisipasi atau terlibat dalam *collaborative governance*, komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kerjasama. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang susah dalam kolaborasi, namun komitmen harus mampu bertanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan perlu dikembangkan.

d. *Share understanding*

Pada pembahasan yang sama dalam kolaborasi, stakeholder juga harus terlibat saling berbagi pemahaman atau informasi mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang akan dilaksanakan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai visi, misi, tujuan bersama, ideologi yang sama, dan lain-lainnya. Sehingga dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk mengartikan suatu masalah.

e. *Intermediate outcomes*

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dengan baik maka dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan

hasil proses yang kritis dan menyatu dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi terwujudnya keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini akan muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kerjasama yang mana secara relative konkrit.

1.6.2. Pemulihan Pariwisata

Menurut (Soeseno, 2019) krisis yang terjadi dalam bidang kepariwisataan dapat hadir dan berulang secara berturut-turut dalam beberapa periode. Meskipun krisis telah berhenti dan dapat dikendalikan, proses penanganan pun masih tetap dilanjutkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun langkah pemulihan krisis pariwisata meliputi hal berikut:

1. Strategi komunikasi untuk membangun kembali citra. Pada langkah ini manajerial krisis harus lebih proaktif dalam strategi komunikasi dan menyampaikan kepada media massa terkait berbagai aspek pemulihan, berupaya menciptakan berita positif, menyelenggarakan perjalanan dengan wartawan untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai, mengenang kembali krisis dengan media massa untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang, mengantisipasi adanya tuntutan hukum, menciptakan outlite berita sendiri pada website, serta bergabung dengan komunikasi global dalam mengampanyekan program kepariwisataan.
2. Fleksibilitas dalam program promosi. Pada langkah ini dilakukan dengan menciptakan pasar baru untuk produk segmen ceruk yang andal dan kuat, target segmen adalah pada wisatawan berpengalaman, memberikan penawaran harga khusus, menggeser program promosi menarik menjadi pasar wisatawan yang potensial, membentuk program promosi pasar domestik, meningkatkan kunjungan wisata dengan program khusus penyesuaian, menempatkan travel advisories secara serius, serta

mengintensifkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam proses pemulihan.

3. Program keamanan, keselamatan, dan kepastian di masa mendatang. Pada langkah ini dilakukan dengan mengevaluasi kembali sistem dan prosedur keamanan, keselamatan, kepastian, dan kenyamanan destinasi. Dilakukan pula dengan menekankan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pendukung destinasi wisata.

Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun program CHS (Cleanliness, Health and Safety) sebagai strategi pemulihan destinasi wisata di tatanan new normal dengan melibatkan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang nantinya diharapkan pariwisata dapat produktif dan aman dari covid-19. Dikutip dari CNN Indonesia "Protokol ini akan melalui beberapa tahapan, mulai dari melakukan simulasi, lalu sosialisasi dan publikasi kepada publik, dan yang terakhir melakukan uji coba. Pelaksanaan tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan daerah". Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan inovasi dan perbaikan di sektor pariwisata. Sehingga dengan adanya perubahan tren di pariwisata global saat ini diharapkan Indonesia mampu beradaptasi. Dalam hal ini perubahan tren di pariwisata akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti solo travel tour, virtual tourism, serta staycation dimana isu health, hygiene, dan safety akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin berwisata (Solemede et al., 2020).

Menurut (Pambudi et al., 2020) Penanganan jangka menengah yang bisa dilakukan dalam pemulihan pariwisata harus dilakukan melalui perbaikan proses dan rantai nilai dalam aspek pariwisata. Dalam hal ini strategi kolaborasi antarpemangku juga dituntut menjadi bagian dari penanganan Covid-19 yang meliputi

Akademik, Bisnis, Pemerintah, Komunitas/Pelanggan serta Media harus saling berkontribusi dan berkolaborasi dalam pemulihan pariwisata setelah adanya bencana pandemi serta Meningkatkan insentif bagi pelaku usaha pariwisata, maskapai penerbangan, travel agent, dan promosi berupa diskon tiket pesawat, parkir pesawat dan diskon bahan bakar jet di beberapa bandara tujuan wisata prioritas, pemberian insentif group incentive trip/famtrip yang diselenggarakan di Indonesia, promosi melalui influencer.

Menurut (Hadi, 2019) beberapa arah kebijakan yang dapat digunakan dalam proses pemulihan agar mampu menjadi lebih baik dengan membangun kembali layanan yang lebih baik dan lebih aman dan berorientasi kemudahan akses publik, dan sebagai sistem pendukung kehidupan dan dukungan untuk kehidupan regional dan masyarakat serta pengurangan risiko bencana adalah dimensi utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk ketahanan daerah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, karena pemulihan pascabencana bertujuan memperkuat ekonomi daerah dan masyarakat didasarkan pada pengoptimalan penggunaan sumber daya lokal untuk mencapai pertumbuhan. Untuk membangun kembali fasilitas pemerintah, ekonomi yang lebih baik sebelum bencana, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong daya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas daya saing.

1.6.3. *Pariwisata Next Normal*

Kondisi next normal bidang pariwisata akan ditandai dengan penerapan standar di berbagai obyek dan daya tarik wisata (ODTW). Sertifikasi CHSE dengan segala ketentuan yang ada menyangkut proses, mekanisme, standar, dan instrument yang harus dipenuhi oleh semua pelaku wisata menjadi kendala tersendiri untuk bisa bangkit (Efendi et al., n.d.). Penggunaan tata kelola kolaboratif adalah solusi

untuk mempercepat terwujudnya next normal, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Untuk memenuhi standar bisnis pariwisata harus dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya, misalnya perguruan tinggi, sedangkan untuk ketaatan mematuhi protokol Kesehatan membutuhkan bantuan dari kekuatan masyarakat sipil. Kolaborasi aktor lintas sektor menjadi dasar penting untuk implementasi tata kelola adaptif di era next normal. Kerjasama dan jejaring antar pemangku kepentingan pariwisata merupakan kunci keberhasilan kebangkitan pariwisata yang mengarah pada penerapan ekonomi pariwisata baru yang bercirikan 4 aspek yaitu *Hygiene, Less Crowd, Low Touch dan Low Mobility* (Efendi et al., n.d.). Adapun ciri-ciri baru ekonomi pariwisata di era normal berikutnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 4 Karakteristik Ekonomi Pariwisata Era Next Normal

Hygiene	Less Crowd	Low Touch	Low Mobility
Prioritas dan preferensi utama konsumen dalam masa pandemi adalah Cleanliness, Healthiness, Safety, Environment	Adanya larangan berkerumun, destinasi wisata yang jauh dari keramaian (lesscrowd) menjadi alternatif pilihan yang dicari wisatawan di tengah ketakutan dan	Wisatawan mengurangi kontak fisik karena menjadi sumber penularan Covid 19	Era pandemi adalah era low mobility dimana masyarakat mulai mengurangi mobilitas agar terhindar dari Covid-19.

	kecemasan mental akibat pandem		
Kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi kunci pulihnya industri pariwisata		Sifat industri pariwisata berubah dari high-touch menjadi lowtouch, sehingga contactless solution menjadi pilihan utama wisatawan	Wisatawan akan cenderung melakukan perjalanan wisata jarak dekat
Disiplin penerapan protokol kesehatan menjadi alat branding paling ampuh.		Digitalisasi mulai menjadi solusi sementara sekaligus selamanya	Penggunaan transportasi darat (roadtrip) terutama mobil pribadi menjadi pilihan utama

Sumber: Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 2020

Dengan adanya karakteristik wisatawan di era next normal yang seperti itu, peran pemerintah daerah dan kerjasama antar pemerintah daerah menjadi lebih signifikan. Tata kelola pariwisata pada saat bencana tidak bisa ditangani hanya dengan adaptif governance tetapi harus dengan pendekatan collaborative governance (Zaenuri, 2018). Adaptif governance menunjukkan tentang bagaimana pemerintah memberikan responnya terhadap perubahan yang terjadi, sedangkan

collaborative governance memberikan gambaran terkait respon sekaligus mengakselerasi perubahan yang terjadi dengan melibatkan berbagai stakeholder (Efendi et al., n.d.)

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. *collaborative governance*

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung yang melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, serta berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola suatu program ataupun aset publik (Ansell & Gash, 2007)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah suatu bentuk kerja sama antar stakeholder yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder didalam sebuah forum untuk mencapai keputusan bersama.

1.7.2. Pemulihan Pariwisata

Dalam pemulihan pariwisata harus dilakukan melalui perbaikan proses dan rantai nilai dalam aspek pariwisata. Dalam hal ini strategi kolaborasi antarpemangku juga dituntut menjadi bagian dari penanganan Covid-19 yang meliputi Akademik, Bisnis, Pemerintah, Komunitas/Pelanggan serta Media harus saling berkontribusi dan berkolaborasi dalam pemulihan pariwisata setelah adanya bencana pandemi serta Meningkatkan insentif bagi pelaku usaha pariwisata.

1.7.3. Pariwisata di era next normal

Pariwisata di era next dinormal ditandai dengan penerapan standar di berbagai obyek dan daya tarik wisata (ODTW). Sertifikasi CHSE dengan segala ketentuan yang ada menyangkut proses, mekanisme, standar, dan instrument yang harus dipenuhi oleh semua pelaku wisata serta kolaborasi aktor lintas sektor menjadi dasar penting untuk implementasi tata kelola adaptif di era next normal. Kerjasama dan jejaring antar pemangku kepentingan pariwisata merupakan kunci keberhasilan kebangkitan pariwisata yang mengarah pada penerapan ekonomi pariwisata baru.

1.8. Definisi operasional

Penelitian ini akan menjelaskan dalam beberapa bentuk indikator tentang kolaborasi pemerintah berdasarkan teori-teori diatas, maka hal ini melihat bagaimana peran masing-masing stakeholder beserta proses *collaborative governance* dalam pemulihan pariwisata di desa wisata Karangmojo Gunung Kidul di era next normal.

Tabel 1. 5 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	<p>Langkah-langkah <i>collobotative governance</i> di era next normal</p> <p>1. <i>Face to face dialog</i> Dimana semua bentuk <i>collaborative governance</i> dibangun dari dialog secara langsung atau interaktif dari setiap stakeholder yang terlibat dalam membahas kepentingan bersama.</p> <p>2. <i>Trust building</i></p>	<p><i>Face to face dialog</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat rutin • Musyawarah • Diskusi <p><i>Trust building</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kepercayaan antar aktor stakeholder • Mulai melakukan kolaborasi

	<p>Rasa percaya antara stakeholder memang merupakan hal yang normal diawal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan sekedar tentang negoisasi antara stakeholder, namun merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan dengan aktor yang terlibat.</p> <p>3. <i>Commitment to process</i> Komitmen disini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sesuatu dan tentunya mempunyai relasi yang kuat dalam proses kolaborasi.</p> <p>4. <i>Share understanding</i> Pada pembahasan yang sama dalam kolaborasi, stakeholder juga harus terlibat saling berbagi pemahaman atau informasi mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang akan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan negosiasi dalam proses kolaborasi <p><i>Commitment to process</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap Stakeholder melakukan perjanjian kerja sama atau penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) <p><i>Share understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahap ini setiap stakeholder memiliki persamaan tujuan, persamaan pandangan dan satu visi misi antar aktor stakeholder yang terlibat . <p><i>Intermediate Outcomes</i> Hasil dari proses kolaborasi yang telah dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat CHSE • Perbaikan Fasilitas • Media Promosi
--	--	---

	<p>dilaksanakan dan disini antar stakeholder harus memiliki pandangan atau pemahaman yang sama</p> <p>5. <i>Intermediate outcomes</i></p> <p>Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dengan baik maka dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan menyatu dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi terwujudnya keberhasilan suatu kolaborasi</p>	
--	---	--

1.9. Metodologi Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat menganalisa subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Lexy J. Moleong, 2009).

Alasan digunakan analisa kualitatif deskriptif adalah karena sesuai dengan judul dipaparkan yaitu *collaborative governance* dalam pemulihan pariwisata di era next normal khususnya didesa wisata karangmojo, kabupaten gunung kidul Yogyakarta. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan indikator yang diteliti terkait Kolaborasi.

1.9.2. Lokasi penelitian

Penelitian akan dilakukan di desa wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta dan institusi yang berkaitan untuk menghimpun data terkait *collaborative governance* dalam pemulihan pariwisata di era next normal.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam *collaborative governance* dalam pemulihan sektor pariwisata di era next normal khususnya didesa wisata Bejiharjo, karang mojo, Gunungkidul, Yogyakarta adalah pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Tabel 1. 6 Subjek Penelitian

No.	Narasumber	Keterangan
1	<p>Pihak Pemerintah:</p> <p>a. Dinas Pariwisata Gunung Kidul</p> <p>b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMNDes) Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan Keterlibatan dalam lembaga <i>superbody</i> yang mengatur seluruh proses perizinan investasi • Keterlibatan dalam pengelolaan obyek wisata di Bejiharjo, Karang Mojo, Gunung Kidul • Keterlibatan pengelolaan Tiket obyek wisata di Bejiharjo, Karang Mojo, Gunung Kidul
2.	<p>Pihak Swasta:</p> <p>1. Cv Dewa Bejo</p> <p>2. Cv Wirawisata</p> <p>3. Cv Panca Wisata</p> <p>4. Cv Tunas Wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia Layanan Pariwisata dalam obyek wisata di

	<p>5. Cv Meriwis Putih 6. Cv Karya Wisata, 7. CvKedunggupit Adventure</p>	<p>Bejiharjo, Karang Mojo, Gunung Kidul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dalam jasa travel atau pemandu tours dalam obyek wisata di Bejiharjo, Karang Mojo, Gunung Kidul • Keterlibatan dalam Media Promisi wisata di Bejiharjo, Karang Mojo, Gunung Kidul
3.	<p>Masyarakat: Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) desa wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) • Keterlibatan dalam pemantauan pengelolaan desa wisata Bejiharjo,

		Karangmojo, Gunung Kidul.
--	--	---------------------------------

1.9.4. Unit Analisis

Sesuai dengan inti permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam dalam pemulihan sektor pariwisata di era next normal khususnya di desa wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta.

1.9.5. Sumber Data

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa teks, kata-kata tulisan, frasa-frasa atau symbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Karena yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang dibutuhkan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1.9.6. Jenis Data

a. Data Primer

Data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang dengan penelitian melalui wawancara kepada beberapa anggota pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat yang ikut terlibat dalam pemulihan sektor pariwisata di era next normal khususnya di desa wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumen dan literature-literature yang ada dalam objek

penelitian. Data sekunder guna mendukung penelitian ini didapat melalui data yang tersedia di website kawasan ekonomi khusus mandalika, jurnal, artikel, dan surat kabar.

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data seakurat mungkin mengenai variable yang dikaji dalam penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

A. Observasi

Observasi merupakan proses dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Teknik ini penting dilakukan dalam penelitian ini karena untuk mengamati proses kolaborasi dan peran masing-masing stakeholder dalam pemulihan desa wisata. Hasil observasi diharapkan dapat membantu dalam memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kolaborasi yang terjadi di desa wisata bejiharjo, karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta

B. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan terkait dengan menggali informasi melalui percakapan, komunikasi di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber.

Wawancara akan dilakukan oleh beberapa instansi terkait:

1. Dinas pariwisata Gunungkidul kidul mengenai keterlibatan lembaga dalam pengelolaan Desa wisata Bejiharjo,
2. BUMdes GunungKidul desa wisata Bejiharjo mengenai pengelolaan tiket masuk wisata.
3. Pihak Swasta mengenai keterlibatan dalam penyediaan barang dan jasa dalam pemenuhan objek wisata di Bejiharjo
4. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam pengembangan SDM guna merawat dan menjaga Objek Wisata.

C. Studi kepustakaan

Digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data sekunder mengenai beberapa hal, yaitu mengenai pengelolaan obyek wisata di Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Adapun sumbernya adalah dari berbagai buku teks, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, informasi media massa, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

1.9.8. Teknik Analisis Data

Cara menganalisa data dalam penelitian ini dengan menyusun menggunakan analisa deskriptif diperoleh dari diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi tentang kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut yang diperoleh dari naskah wawancara dan analisis isi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

A. Reduksi data

Merupakan data proses pemilihan yang diperoleh dengan cara mentransformasikan data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

B. Penyajian data

Merupakan penyajian data yang berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan sebuah kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti juga melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan dilakukandengan teks naratif, foto dan gambar sejenisnya.

C. Kesimpulan

Tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview dan analisis isi.